

**KEBIJAKAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT  
DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PLATFORM AKSI BEIJING  
MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Sofia Indriane**

**NIM : 079615325**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL TH. 2001/2002**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:


**"Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam  
Pengimplementasian Platform Aksi Beijing Mengenai  
Kekerasan terhadap Perempuan"**

Ditulis oleh:

Sofia Indriane  
079615325

Disetujui Untuk Diajukan pada  
Ujian Akhir Skripsi  
Semester Gasal Tahun Ajaran 2001/2002

Surabaya, 5 Februari 2002  
**Dosen Pembimbing,**

  
**Drs. Djoko Sulistyo, MS.**  
NIP. 131 453 807

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEMESTER GASAL 2001/2002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
pada tanggal 5 Februari 2002, pukul 12.00 – 13.40 WIB.

Panitia Penguji terdiri dari :

Ketua,



**Dra. Lilik Salamah, MSI**

NIP. 131 569 360

Anggota,



**Dra. Sartika Soesilowati, MA**

NIP. 132 134 681

Anggota,



**Siti Rohmawati Susanto, SIP**

NIP. 132 255 147

## ABSTRAK

Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing, Cina, pada tahun 1995 menghasilkan Platform Aksi Beijing yang secara komprehensif memuat seperangkat ketentuan mengenai agenda pemberdayaan dan penegakan hak-hak perempuan, termasuk mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai manifestasi paling buruk dari ketidakadilan *gender*. Platform Aksi Beijing memuat seperangkat ketentuan dalam bentuk kerangka kerja yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah, badan-badan internasional, dan NGO's untuk secara aktif bersama-sama menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan hambatan dalam mencapai kemajuan perempuan lainnya. Dalam hal ini, Platform Aksi Beijing juga mensyaratkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (melalui penerapan CEDAW sebagai instrumen internasional utama yang mengatur penghapusan diskriminasi terhadap perempuan) yang dinilai sebagai sumber segala persoalan perempuan dalam mencapai kemajuan dan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan oleh semua negara yang menyepakatinya. Asumsi dasar Platform Aksi Beijing mengenai kekerasan terhadap perempuan adalah: tanpa penghapusan ketimpangan/ketidakadilan *gender* yang menjadi sumber persoalan, maka kekerasan terhadap perempuan juga tidak akan terhapus.

Sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam Konferensi Beijing, Amerika Serikat yang menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan Platform Aksi Beijing, menghasilkan sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam Platform Aksi tersebut. Namun, ternyata angka kekerasan terhadap perempuan di Amerika Serikat masih tetap tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang berarti.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya berupaya untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat mengimplementasikan kebijakannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Platform Aksi Beijing dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Amerika Serikat. Jangkauan penelitian ini adalah tahun 1995 - 2000, yaitu setelah diadakannya Konferensi Beijing dan batas waktu pertama program lima tahun penindaklanjutan Platform Aksi Beijing (Beijing Plus Five).

Hipotesis penelitian ini adalah: Pertama, Pemerintah Amerika Serikat belum sepenuhnya mengimplementasikan Platform Aksi Beijing mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam kebijakannya. Kedua, kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Platform Aksi Beijing tidak dapat secara efektif menghasilkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup besar dalam kurun waktu dilaksanakannya kebijakan tersebut sampai batas waktu evaluasi program lima tahunan pertama implementasi Platform Aksi Beijing (1995-2000). Ketiga, ketidakefektifan kebijakan pemerintah Amerika Serikat mengenai kekerasan terhadap perempuan terkait dengan variabel pengaruh di sekitar implementasi kebijakan dan peran pemerintah Amerika Serikat dalam menghapuskan ketidakadilan *gender*, baik dalam kebijakannya maupun dalam masyarakat.

**Kata Kunci :** Ketidakadilan *gender*, Kekerasan terhadap Perempuan, Platform Aksi Beijing, Implementasi Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat.